

# ANALISIS PENERAPAN PP NOMOR 71 TAHUN 2010 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARO

Oleh:

Andi Elkana Baru

Universitas Darma Agung, Medan

E-mail:

[andielkanabarus@gmail.com](mailto:andielkanabarus@gmail.com)

## ABSTRACT

*The government emphasizes in making financial statements that refer to the general guidelines for the Government Accounting System. Furthermore, the government issued Government Regulation No. 71 of 2010 which contains the Implementation of Accrual Bases in the government's financial statements. Based on this background the authors are interested in conducting research by taking the title "Analysis of the Application of Government Regulation Number 71 of 2010 in the Compilation of Financial Statements at the Karo District Office". The issue raised was whether the presentation of the financial statements of the Karo Regency Transportation Office in 2018 was in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010. Presentation of the Karo District Transportation Department financial statements as a whole has not yet applied PP Number 71 of 2010, this is because the two components namely the Over budget Balance Report and the Cash Flow Report are not in the Karo Regency Transportation Department Financial Report.*

**Keywords:** *Analysis of Application, pp number 71 of 2010, Financial Statements.*

## ABSTRAK

Pemerintah menekankan dalam pembuatan laporan keuangan agar mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang berisi tentang Penerapan Basis Akrual pada laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul "**Analisis Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Kabupaten Karo**". Adapun masalah yang diangkat adalah apakah penyajian laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Karo tahun 2018 telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Penyajian laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Karo secara keseluruhan belum menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010, hal ini dikarenakan dua komponen yaitu Laporan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas tidak ada pada Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Karo. Dua komponen ini dibuat oleh Bendahara Umum Daerah dan Penyajian laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Karo pada Laporan Operasional khususnya beban barang dan jasa belum sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

**Kata Kunci:** Analisis Penerapan, PP Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan

## 1. PENDAHULUAN

Laporan Keuangan merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi pengguna dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Karo merupakan wujud akuntabilitas atas sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terdiri dari masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa /pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi) serta memberikan informasi tentang pelaksanaan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Karo yang telah dituangkan dalam APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018 dan sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan sekaligus menunjukkan akuntabilitas, manajerial, transparansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Catatan atas laporan keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan pada laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun nonkeuangan untuk memudahkan pengguna

dalam memahami laporan keuangan dan menghindari kemungkinan terjadinya kesalahpahaman disebabkan persepsi dari pembaca laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam hal berkaitan dengan penerapan SAP berbasis akrual sesuai PP No 71 Tahun 2010 maka setiap pemerintah daerah provinsi/kabupaten dan kota dianggap perlu menyusun kebijakan akuntansi tersebut.

Salah satu ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu mewajibkan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai basis penyusunan laporan keuangan bagi instansi pemerintah sebagai salah satu penjelasan di Undang-undang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa SAP dimaksud ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah yang saat ini diatur dengan PP No. 71 Tahun 2010.

Pengertian SAP menurut PP RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Dalam SAP terdapat metode atau basis yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Menurut PP 71 Tahun 2010 Bab II tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 4 ayat 1 bahwa Pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual. Pengertian SAP berbasis akrual dalam Standar Akuntansi Pemerintah Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 8 SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas

dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Oleh karena itu laporan keuangan mengambil keputusan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan realisasi pencapaian target pendapatan realisasi penyerapan belanja dan realisasi penyerapan pembiayaan. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang berlaku pada saat ini di Negara kita, masalah pengelolaan keuangan daerah telah menjadi perhatian umum bagi para pengambil keputusan dalam pemerintah baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karo”**.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut *American Accounting Association (AAA)*, *Accounting is the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit information judgment and decision by users of the information. Akuntansi adalah* proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Sedangkan menurut *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*, *Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and terms of money, transaction and events which are, in part at least, of financial character, and interpreting the result there*

*of. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasil-hasilnya*

#### 2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Menurut Mursyidi (2013:1) “Akuntansi pemerintah merupakan mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah”.

Sementara itu menurut V.Wiratna Sujarweni (2015:18) “Akuntansi pemerintah adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan Negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya”.

Dari definisi-definisi di atas, dapat diambil kesimpulan mengenai “akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang memproses transaksi keuangan Negara dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya dari tingkat pusat maupun tingkat daerah”.

#### 2.1.1.2 Tujuan Akuntansi Pemerintah

Menurut Deddi Nordiawan dkk (2012:7) “Akuntansi pemerintah berkembang dengan ciri-ciri khas dan tujuan sebagai berikut:

1. Investasi pada aset yang tidak menghasilkan pendapatan  
Pada umumnya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memerlukan investasi yang besar pada aset yang tidak menghasilkan pendapatan seperti jalan, jembatan dan bangunan pabrik lainnya.
2. Tidak ada pengungkapan laba  
Tujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada

- masyarakat, bukan pencapaian laba. Dalam sektor pemerintahan tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak oleh masyarakat dengan jasa yang diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak ada terdapat laporan laba rugi yang mengungkapkan pencapaian sebuah laba.
3. Tidak ada pengungkapan kepemilikan  
Pemerintah tidak mempunyai kekayaan sendiri sebagaimana perusahaan dan pemerintah tidak dimiliki oleh individu atau golongan. Dengan demikian, tidak akan terdapat pernyataan atau pengungkapan yang menunjukkan kepemilikan suatu pihak seperti halnya ditunjukkan oleh bagian modal sebuah neraca perusahaan.
  4. Penggunaan akuntansi dana  
Dengan segala karakteristik yang melekat pada organisasinya, akuntansi lebih memandang pemerintah sebagai kesatuan dana dengan tujuan dari misi tertentu, tidak sebagai sebuah entitas organisasi yang mempunyai kepemilikan. Hal ini memberikan implikasi pada penggunaan persamaan akuntansi yang tidak lagi menggunakan modal pemilik melainkan saldo dana.

## **2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**

### **2.1.2.1 Pengertian SAP**

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD). Laporan keuangan pokok menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berikut ini adalah beberapa pengertian SAP yang diambil dari beberapa sumber yaitu menurut Abdul Halim dan Syam Kusufi (2012:53) “Standar Akuntansi Pemerintahan adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan organisasi pemerintah untuk menjawab tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi publik”.

### **2.1.3 Basis Akuntansi**

#### **2.1.3.1 Pengertian Basis Kas**

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 SAP berbasis akrual pernyataan No.1 penyajian laporan keuangan bahwa “Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dari peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **2.1.3.2 Pengertian Basis Kas Menuju Akrual**

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 SAP berbasis kas menuju akrual pernyataan No.1 penyajian laporan keuangan bahwa “Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

SAP berbasis kas menuju akrual diterapkan dalam masa transisi bagi entitas yang belum siap menerapkan SAP berbasis akrual pada tahun 2015. Laporan keuangan yang dihasilkan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan dibagi menjadi dua entitas yaitu entitas pelaporan dan akuntansi.

#### **2.1.3.3 Pengertian Basis Akrual**

Berikut ini adalah pengertian-pengertian tentang basis akrual menurut

beberapa sumber menurut Jan Hoesada (2015:113) “Basis akrual adalah proses akuntansi dengan mengakui pendapatan saat dihasilkan tanpa perlu memerhatikan penerimaan kas (dapat lebih dahulu, atau sama dengan arus kas masuk atau tunai atau pendapatan kredit), dan beban diakui saat terjadinya beban tanpa perlu memerhatikan pembayarannya (dibayar di muka, biaya saat saat tunai, atau biaya timbul walaupun belum dibayar).

SAP berbasis akrual merupakan SAP yang mengakui pendapatan-LO, beban, aset kewajiban dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

#### **2.1.4 Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1` paragraph ke 7 dalam Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2014), Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dan posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Menurut Irham Fahmi (2012:2), berpendapat bahwa “Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Selain itu laporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapat memperkirakan jumlah waktu dan ketidakpastian penerimaan kas di masa yang akan datang yang berasal dari pembagian dividen”.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini bertempat di Dinas Perhubungan Kabupaten Karo yang berlokasi Jalan Kotacane No. 403 Kabanjahe, Kabupaten Karo. Lokasi tersebut

dipilih karena memiliki semua aspek pendukung agar peneliti dapat melakukan penelitian dengan baik. Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Maret sampai Juni 2019.

#### **3.2 Definisi Operasional Variabel**

Definisi Operasional Variabel adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, definisi operasional di perlukan untuk membuat petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengetahui suatu variable tersebut. Variabel adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi, keadaan, faktor, perlakuan, atau tindakan yang diperkirakan dapat mempengaruhi hasil eksperimen.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Dalam penggalan data dan informasi, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu peneliti yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskripsi yaitu penelitian hanya menggambarkan, meringkas, berbagai kondisi atau berbagai variabel.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data sekunder yaitu Peneliti menggunakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat langsung oleh peneliti dari Dinas Perhubungan Kabupaten Karo.

#### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data dan keterangan yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini, penulis memakai 2 metode yaitu :

1. Peneliti Keperustakaan (*Library Research*)

Studi perpustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, kerangka ilmiah, literature-literatur, majalah-

majalah, catatan-catatan dan laporan-laporan untuk membantu di dalam menyelesaikan dan juga untuk melengkapi data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. **Peneliti Lapangan (*Field Research*)**  
Penelitian lapangan adalah penelitian yang di dapat langsung dari objek yang diteliti yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Karo. Adapun teknik pengumpulan data adalah :
  - a. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada informan atau pihak yang berhubungan dan memiliki relevansi terhadap masalah yang berhubungan dengan penelitian.
  - b. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 cara yaitu :

1. **Metode Analisis Deskriptif**  
Analisis data deskriptif adalah cara analisis dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, mencari bukti data, merumuskan dan menafsirkan data yang diperoleh, disusun dan dianalisa.
2. **Metode Komparatif**  
Analisis komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan, penelitian yang mengacu pada membandingkan antara PP Nomor 71 Tahun 2010 dengan laporan keuangan Dinas

Perhubungan Kabupaten Karo tahun 2018.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Karo

Dinas Perhubungan Kabupaten Karo beralamat di Jln. Kotacane No.403 Kabanjahe. Sebagai Perangkat Daerah Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah daerah dibidang Perhubungan Darat dan danau berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut.

Dinas Perhubungan Kabupaten Karo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II/b) yang dibantu oleh 1 (satu) Orang Pejabat Struktural (Eselon III/a) , 4 (empat) orang Orang Pejabat Struktural (Eselon III/b), 15 (lima belas) Orang Pejabat Struktural (Eselon IV), serta 34 (tiga puluh empat) Orang Staf dan 47 (empat puluh tujuh) Orang Pegawai Honoror.

Dinas Perhubungan Kabupaten Karo memiliki komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* dengan transparan dan akuntabel.

Struktural organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Karo telah dikeluarkan melalui Perda Kabupaten Karo Nomor 18 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dinas Perhubungan.

#### 4.1.1 Uraian Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Karo

Dinas Perhubungan Kabupaten Karo dipimpin oleh Kepala Dinas yang bernama **Gelora Fajar, SH, MH**. Dinas Perhubungan memiliki setiap bidang seperti dalam bidang Lalu Lintas, bidang Angkutan, bidang Prasarana dan bidang Pengembangan dan Keselamatan serta seksi-seksi setiap bidang tersebut.

Jumlah pegawai kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Karo pada saat ini sebanyak 55 orang. Meningkatnya beban dan luas lingkup tugas, maka personil sebanyak 55 orang tersebut disarankan masih sangat kurang. Untuk mengatasi kekeurangannya pegawai tersebut, maka pada saat sekarang terpaksa dilakukan rekrutment pegawai honorer yang penggajiannya dari APBD Kabupaten Karo yaitu sebanyak 47 orang.

**Tabel. 4.6 :** Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2018

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Belanja Pegawai	6.406.973.734	5.858.329.261	91,44
Belanja Barang	2.066.177.341	1.331.176.432	64,43
Belanja Modal	2.362.821.016	2.161.910.500	91,50
<b>Jumlah</b>	<b>10.835.972.091</b>	<b>9.351.416.193</b>	<b>86,30</b>

Sumber : Olahan Penulis, 2019

Realisasi Belanja TA. 2018 mengalami Kenaikan dibandingkan TA. 2017 sebesar Rp 1.568.308.047 atau sebesar 16,77 persen dibandingkan atas realisasi anggaran tahun sebelumnya, perbandingan realisasi belanja TA. 2018 dan 2017 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel. 4.7 :** Perbandingan Realisasi Belanja TA. 2018 dan 2017

Uraian	Realisasi Belanja (Rp.)		Naik (Turun)	
	TA. 2018	TA. 2017	Rp.	%
Belanja	5.858.329.261	4.098.715.464	1.759.613.797	30,03

Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa	1.331.176.432	1.151.692.582	179.483.850	13,48
Belanja Modal	2.161.910.500	2.532.700.100	(370.789.600)	(17,15)
<b>Jumlah</b>	<b>9.351.416.193</b>	<b>7.783.108.146</b>	<b>1.568.308.047</b>	<b>16,77</b>

Sumber : Olahan Penulis, 2019

- a. Belanja Pegawai  
Belanja Pegawai adalah Belanja Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja serta Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang merupakan Belanja Tidak Langsung ditambah Belanja Pegawai atas realisasi Belanja Langsung. Realisasi belanja pegawai TA. 2018 dan TA. 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.858.329.261 dan Rp4.098.715.464 (Kenaikan sejumlah Rp 1.759.613.797 atau 30,03 persen). Kenaikan realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan Kenaikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Tahun Anggaran 2018.
- b. Belanja Barang dan Jasa  
Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2018 dan TA. 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 1.331.176.432 dan Rp 1.151.692.582 Kenaikan realisasi belanja ini sebesar Rp

179.483.850 atau sebesar 13,48 persen.

- c. Belanja Modal  
Realisasi Belanja Modal TA. 2018 dan TA. 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 2.161.910.500 dan Rp. 2.532.700.100 atau realisasi selama TA. 2018 turun sebesar 17,15 persen.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyajian laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Karo secara keseluruhan belum menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010, hal ini dikarenakan dua komponen ( Laporan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas) tidak ada pada Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Karo. Dua komponen ini dibuat oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
2. Standar Akuntansi Pemerintah yang mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual telah diterapkan dalam laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Karo.

### Keterbatasan Penelitian

1. Peneliti tidak dapat memberikan gambaran tentang Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas karena tidak dapat di akses ke SIMDA Keuangan yang merupakan domain Bendahara Umum Daerah.
2. Sebagian besar pegawai pada bagian keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, sehingga penulis dalam memperoleh

data dan keterangan dalam penyusunan skripsi tidak maksimal.

## Saran

1. Agar unit-unit Dinas Perhubungan Kabupaten Karo yang mengelola pendapatan dapat menyetorkan retribusi daerah tepat waktu agar pencatatan pendapatan ke Simda Keuangan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.
2. Pada Laporan Operasional agar beban barang dan jasa diuraikan satu persatu menjadi beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.
3. Pelaporan Stok Opname Persediaan dan Aset sebaiknya dibuat setiap bulan agar pembuatan laporan keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karo tepat waktu.
4. Masih banyak aparatur pada SKPD yang belum memahami penyusunan dan penyajian laporan operasional secara konsep dan proses padahal dalam konsep akuntansi menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan keuangan.
5. Kelemahan yang ada diimbangi dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan maupun pendidikan tambahan yang berhubungan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Syaiful.2016. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. (Online). (books.google.co.id).



- Baridwan, Zaki.2014. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta:Edisi Ke-8 BPFE. (Online). (books.google.co.id).
- Fahmi, Irham. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta. (Online). (books.google.co.id).
- Halim, Abdul dkk. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hery. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Buku Seru. <http://www.bandung.go.id/>.
- Hoesada, Jan. 2016. *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ihwan, Kema.2013. *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Kota Manado*. Vol.3 No.1.(<http://download.portalgaruda.org/article.php/article=108959&val=1025>).
- Lamonisi, Sony.2016. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintahan Kota Tomohon* Vol.3 No.1. (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/11592/11188>).
- Langelo, Friska.2015. *Analisis Penerapan SAP Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung*. (Online). Vol.3No.1.(<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/6556/6080>).
- Mursyidi.2013. *Akutansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nordiawan, Deddi,dkk. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nuryaman dkk.2015. *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis*. Bandung: Ghalia Indonesia. (Online). (books.google.co.id)
- Prastowo, Dwi. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: UPP STIM YKPN.
- Rudianto.2012. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- S.Munawir.2010. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta:Liberty
- Soemarso.2013. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono.2015. *Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sujarweni, V.Wiratna.2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Buku Press.